APBN SEBAGAI PENYANGGA KRISIS

Menjaga Disiplin Fiskal dan Melindungi Kelompok Rentan



Disiplin fiskal yang tangguh memilih prioritas, melindungi warga, dan menjaga kemampuan negara umtuk pulih.

APBN 2026 • ANGGARAN DITETAPKAN

Pendapatan	Belanja	Defisit	Perlindungan sosial sekitar
Rp3.153,6 triliun	Rp3.842,7 triliun	2,68% PDB	Rp508,2 triliun

REALISASI S.D. 30 SEPTEMBER 2026

Angka sementara, bukan hasil akhir tahun

Pendapatan	Belanja	Defisit
Rp2.341,5 triliun	Rp2.660,5 triliun	1,24% PDB

DUA TUGAS YANG DIJALANKAN BERSAMA

DISIPLIN FISKAL
- Jaga kredibilitas
- Kelola defisit dan utang
- Belanja efektif dan transparan

LINDUNGI KELOMPOK RENTAN
- Bantuan tepat waktu
- Jaga layanan dasar
- Cegah kemiskinan berkepanjangan

SIKLUS RESPONS KRISIS

1. Petakan risiko
2. Salurkan dukungan terarah
3. Jaga layanan dan mata pencaharian
4. Evaluasi dan akhiri program sementara tepat waktu

APBN yang kuat = ruang fiskal + perlindungan sosial + akuntabilitas

Oleh: **Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD**
www.rudyct.com/cv.pdf
Guru Besar Manajemen dan AI Data Analyst, IBM-ASMI
RudyCT Academic Series

APBN sebagai Penyangga Krisis: Menjaga Disiplin Fiskal dan Melindungi Kelompok Rentan

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

IBM-ASMI **|** ***RudyCT Academic Series*** **|** ***www.rudyct.com/cv.pdf***

Abstract

APBN berperan sebagai penyangga krisis melalui stabilisasi ekonomi, perlindungan iscal, dan pemeliharaan layanan iscal. Artikel ini membahas cara menjaga disiplin iscal sekaligus melindungi kelompok rentan dalam menghadapi guncangan ekonomi, iscal n, iklim, dan iscal. Pembahasan menguraikan fungsi APBN, pagar iscal dan utang, penyangga otomatis serta kebijakan diskresioner, kualitas belanja, penerimaan dan ruang iscal, pembiayaan utang, hubungan pusat-daerah, serta mekanisme evaluasi. Konteks APBN Indonesia 2026 digunakan dengan membedakan angka rencana dan realisasi sementara. Argumen utama artikel ialah bahwa disiplin fiskal yang tangguh tidak berarti pemotongan seragam, melainkan kemampuan memilih prioritas, membiayai respons secara transparan, dan menyiapkan jalan keluar dari program sementara. Perlindungan sosial yang tepat waktu dan terarah dapat mencegah kerugian manusia dan mendukung pemulihan, tetapi efektivitasnya bergantung pada data, kapasitas pelaksanaan, dan akuntabilitas. Artikel menyimpulkan bahwa APBN akan lebih tahan krisis jika risiko fiskal dipetakan sebelum guncangan, ruang fiskal dibangun pada masa normal, dan hasil kebijakan dinilai berdasarkan manfaat bagi masyarakat serta keberlanjutan kewajiban negara.

Kata Kunci: APBN; disiplin fiskal; krisis; perlindungan sosial; kelompok rentan; ruang fiskal; utang publik; stabilisasi ekonomi

Pendahuluan: APBN di tengah ketidakpastian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen utama negara untuk menjalankan pelayanan publik, membiayai pembangunan, memelihara stabilitas ekonomi, dan mengurangi risiko sosial. Dalam keadaan normal, APBN menerjemahkan prioritas nasional menjadi penerimaan, belanja, dan pembiayaan yang direncanakan untuk satu tahun. Ketika krisis terjadi, fungsi anggaran menjadi lebih nyata: pendapatan pajak dapat melemah, kebutuhan bantuan meningkat, biaya energi atau pangan berubah, usaha mengurangi kegiatan, dan rumah tangga kehilangan pendapatan. APBN perlu menyerap sebagian guncangan itu agar penyesuaian tidak seluruhnya dibebankan kepada warga yang paling rentan.

Peran tersebut mengandung dua mandat yang harus dijalankan bersama. Pertama, negara harus menjaga kemampuan membayar kewajiban, mengendalikan risiko utang, dan mempertahankan kepercayaan pada kebijakan fiskal. Kedua, negara harus mencegah krisis sementara berubah menjadi kemiskinan berkepanjangan, putus sekolah, gizi buruk, penyakit yang tidak tertangani, atau hilangnya mata pencaharian. Disiplin fiskal tidak identik dengan pemotongan belanja secara membabi buta, sedangkan perlindungan sosial tidak berarti seluruh permintaan belanja harus dipenuhi tanpa pertimbangan biaya. Tantangannya adalah menata komposisi, waktu, sasaran, dan pembiayaan respons dengan bukti serta aturan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Konteks APBN Indonesia 2026

Untuk memberi pijakan konkret, APBN Tahun Anggaran 2026 ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025. Pemerintah menetapkan pendapatan

negara Rp3.153,6 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, dan defisit sekitar 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dalam rancangan dan pengesahan anggaran tersebut, perlindungan sosial direncanakan sekitar Rp508,2 triliun, di samping alokasi besar untuk pendidikan, kesehatan, energi, pangan, dan program prioritas. Angka rencana ini perlu dibedakan dari realisasi yang berubah sepanjang tahun. Perbedaan klasifikasi juga penting: anggaran fungsi perlindungan sosial menurut klasifikasi tertentu tidak selalu sama dengan seluruh belanja yang mempunyai tujuan sosial di berbagai pos anggaran (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025a, 2025b).

Publikasi APBN KiTa edisi Oktober 2026 melaporkan bahwa sampai dengan 30 September, pendapatan negara tercatat Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target, belanja negara Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu, dan defisit mencapai 1,24 persen PDB. IMF dalam konsultasi Article IV tahun 2025 mencatat target defisit APBN 2026 sekitar 2,7 persen PDB dan menganjurkan agar defisit dijaga dekat sasaran yang telah disetujui, sembari memastikan belanja prioritas berjalan efektif (IMF, 2026). Data realisasi September merupakan potret pelaksanaan hingga tanggal tertentu, bukan hasil akhir tahun. Karena itu, ia tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh program telah tersalurkan tepat waktu atau bahwa ruang fiskal sudah aman. Angka agregat perlu dibaca bersama mutu belanja, komposisi penerimaan, kewajiban pembiayaan, ketepatan penargetan, dan risiko yang masih mungkin muncul pada sisa tahun anggaran (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2026).

Apa yang dimaksud dengan krisis dan guncangan fiskal

Krisis adalah keadaan ketika guncangan ekonomi, sosial, kesehatan, iklim, atau geopolitik mengganggu kemampuan masyarakat dan pemerintah untuk mempertahankan fungsi penting. Guncangan dapat bersifat mendadak, seperti pandemi, gempa, banjir besar, atau lonjakan harga energi. Ia juga dapat berkembang perlahan, seperti penurunan produktivitas, penuaan penduduk,

perubahan iklim, degradasi lingkungan, atau beban kesehatan yang meningkat. Tidak semua gangguan langsung menjadi krisis fiskal. Namun, gangguan dapat beralih ke ranah fiskal apabila menekan penerimaan, menaikkan belanja wajib, menimbulkan kebutuhan kompensasi, atau meningkatkan biaya pembiayaan negara.

Kerangka pengelolaan risiko fiskal sebaiknya membedakan sumber guncangan, jalur penularan, serta besarnya kewajiban kontinjensi. Risiko langsung mencakup belanja darurat dan penurunan penerimaan. Risiko tidak langsung dapat muncul melalui penjaminan pemerintah, kewajiban badan usaha milik negara, kerugian sektor keuangan, tunggakan pembayaran, atau kebutuhan rekonstruksi. Risiko juga dapat saling memperkuat: bencana merusak infrastruktur, mengganggu produksi, menaikkan harga pangan, menurunkan pendapatan warga, dan mengurangi penerimaan daerah. Pemetaan seperti ini membantu pemerintah membangun skenario, menyiapkan cadangan, dan menghindari respons yang hanya mengikuti peristiwa paling terlihat.

Fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi

APBN mempunyai tiga fungsi klasik dalam ekonomi publik. Fungsi alokasi mengarahkan sumber daya untuk barang dan layanan publik, seperti jalan, sekolah, layanan kesehatan, perlindungan lingkungan, administrasi, serta infrastruktur yang tidak selalu dapat disediakan pasar secara memadai. Fungsi distribusi memengaruhi siapa yang menanggung pajak dan siapa yang memperoleh manfaat belanja, melalui bantuan sosial, subsidi, layanan universal, dan pembiayaan pembangunan. Fungsi stabilisasi berupaya meredam fluktuasi ekonomi melalui penerimaan, belanja, dan pembiayaan yang disesuaikan dengan kondisi siklus ekonomi. Dalam praktik, satu pos APBN dapat menjalankan beberapa fungsi sekaligus.

Dalam krisis, ketiga fungsi itu harus diselaraskan. Belanja yang menjaga operasi puskesmas atau bantuan pangan dapat sekaligus melindungi manusia,

mempertahankan permintaan lokal, dan mencegah kerugian produktivitas jangka panjang. Sebaliknya, proyek yang disebut sebagai stimulus belum tentu efektif apabila tidak siap dilaksanakan, tidak menyasar kebutuhan yang nyata, atau mempunyai kandungan impor sangat tinggi. Penilaian harus melihat output, outcome, siapa penerima manfaat, dan kapan dampak muncul. Pendekatan ini menggeser diskusi dari sekadar "berapa besar belanja" menjadi "masalah apa yang diselesaikan, dengan biaya berapa, dan apakah hasilnya lebih baik daripada alternatif."

Disiplin fiskal dan kredibilitas

Disiplin fiskal berarti pemerintah mengelola penerimaan, belanja, dan utang dengan cara yang konsisten terhadap kemampuan ekonomi dan kewajiban jangka panjang. Disiplin membutuhkan anggaran yang transparan, asumsi makro yang realistis, pencatatan kewajiban secara lengkap, pengendalian komitmen belanja, serta pelaporan yang dapat diperiksa. Tujuannya bukan mengejar angka defisit serendah mungkin dalam setiap situasi, tetapi mencegah kebijakan saat ini mengurangi kemampuan negara melayani masyarakat pada masa depan. Kredibilitas fiskal menurunkan ketidakpastian dan dapat membantu pemerintah menjaga akses pembiayaan dengan biaya yang wajar.

Indonesia memiliki pagar fiskal yang dikenal luas: batas defisit pemerintah umum sebesar 3 persen PDB dan batas utang sebesar 60 persen PDB dalam kerangka hukum yang berlaku. IMF menilai aturan fiskal tersebut telah menjadi pilar stabilitas, dengan ruang untuk memperkuat mobilisasi penerimaan dan kualitas belanja tanpa mengorbankan kredibilitas, kesederhanaan, dan keterlaksanaan aturan (International Monetary Fund [IMF], 2024). Pagar ini harus dipahami sebagai pengaman jangka menengah, bukan target operasional yang menggantikan analisis ekonomi. Defisit di bawah batas tidak otomatis membuktikan mutu anggaran, sedangkan penggunaan ruang defisit yang sah

tidak otomatis berarti kebijakan tidak disiplin. Ukurannya adalah alasan, dampak, pembiayaan, risiko, dan rencana kembali ke lintasan yang berkelanjutan.

Batas defisit dan fleksibilitas saat krisis

Aturan fiskal yang kaku dapat memperbesar kerugian jika pemerintah dipaksa memangkas belanja justru ketika ekonomi melemah dan rumah tangga membutuhkan dukungan. Namun, aturan yang terlalu longgar dapat mengurangi insentif untuk menilai prioritas dan membuat utang meningkat tanpa strategi keluar. Desain yang baik menggabungkan batas yang mudah dipahami, prosedur pengecualian yang jelas untuk keadaan luar biasa, pengawasan legislatif, transparansi biaya, dan rencana pemulihan setelah krisis. Fleksibilitas bukan kebebasan tanpa batas; ia adalah kemampuan merespons berdasarkan kriteria yang diumumkan dan dapat ditinjau.

Pengalaman pandemi memberi pelajaran bahwa penyimpangan sementara dapat dibenarkan bila guncangannya luar biasa, tetapi kebijakan harus menyebutkan tujuan, durasi, ukuran dukungan, sumber pembiayaan, dan indikator untuk mengakhiri program. IMF mencatat bahwa Indonesia memulihkan kembali batas defisit lebih cepat daripada jadwal yang semula direncanakan, sekaligus menekankan perlunya menjaga kesederhanaan dan kredibilitas kerangka fiskal (IMF, 2024). Ke depan, klausul pengecualian perlu dirancang sebelumnya agar respons tidak tertunda oleh negosiasi aturan ketika keadaan darurat sudah terjadi. Sesudah guncangan mereda, evaluasi harus memeriksa apakah utang digunakan untuk kebutuhan sementara, investasi tahan lama, atau komitmen berulang yang akan terus membebani anggaran.

Penyangga otomatis dan kebijakan diskresioner

Penyangga otomatis adalah unsur sistem pajak dan belanja yang merespons perubahan ekonomi tanpa keputusan baru untuk setiap kejadian. Ketika pendapatan rumah tangga atau keuntungan perusahaan turun, pajak yang

dibayar dapat ikut turun; ketika jumlah keluarga yang memenuhi kriteria bantuan meningkat, belanja tertentu dapat naik bila aturan dan sistem administrasi memungkinkan. Mekanisme otomatis mengurangi jeda kebijakan dan membantu menjaga pendapatan disposabel. Namun, di negara dengan sektor informal yang besar, asuransi pengangguran terbatas, basis pajak sempit, dan administrasi data belum terintegrasi, penyangga otomatis sering lebih lemah. Debrun dan Kapoor (2010) menemukan bahwa penstabil otomatis merupakan saluran utama stabilisasi fiskal dalam sampel lintas negara yang mereka kaji.

Kebijakan diskresioner adalah keputusan baru untuk menambah, mengurangi, atau mengubah pajak dan belanja. Contohnya tambahan bantuan tunai saat bencana, subsidi sementara bagi transportasi publik ketika harga energi melonjak, atau pembiayaan rehabilitasi setelah banjir. Diskresi diperlukan karena setiap krisis mempunyai karakter unik, tetapi keputusan dapat terlambat, salah sasaran, atau sulit dihentikan jika prosedur pengakhiran tidak disiapkan. Keduanya sebaiknya saling melengkapi: aturan reguler menyediakan dasar respons cepat, sedangkan keputusan tambahan menangani kelompok, wilayah, dan kebutuhan yang tidak tertampung oleh sistem yang ada.

Pemetaan kelompok rentan dan risiko

Kelompok rentan bukan kategori tunggal. Kemiskinan pendapatan hanya salah satu dimensi. Kerentanan juga dipengaruhi usia, disabilitas, jenis pekerjaan, status kesehatan, tanggung jawab perawatan, lokasi geografis, kepemilikan aset, akses terhadap dokumen, dan jaringan dukungan. Rumah tangga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat jatuh ke bawahnya ketika pencari nafkah sakit atau kehilangan pekerjaan. Nelayan, petani, pekerja harian, pedagang kecil, pekerja rumah tangga, serta buruh informal sering mengalami guncangan pendapatan tanpa perlindungan asuransi yang memadai. Anak dan lanjut usia

dapat merasakan dampak jangka panjang ketika akses gizi, pendidikan, dan layanan kesehatan terputus.

Pemetaan risiko perlu menggabungkan informasi administratif dengan verifikasi lapangan, data statistik, dan pengetahuan komunitas. Data penerima lama bermanfaat untuk mempercepat penyaluran, tetapi dapat mengecualikan warga yang baru terdampak atau mengalami perubahan kondisi. Sebaliknya, pendaftaran baru dari nol saat keadaan darurat berisiko menunda bantuan. Sistem yang tangguh perlu memungkinkan pembaruan berkala, jalur pendaftaran mandiri, mekanisme pengaduan, serta verifikasi cepat oleh pemerintah daerah dan organisasi lokal. World Bank menekankan bahwa lebih dari sepertiga penduduk Indonesia masih berada dalam kondisi rentan secara ekonomi dan dapat terdorong ke kemiskinan oleh guncangan seperti pandemi maupun bencana alam (World Bank, 2023).

Pekerja informal dan rumah tangga tanpa perlindungan memadai

Pekerja informal menghadapi risiko khusus ketika krisis menurunkan permintaan, menutup pasar, atau membatasi mobilitas. Mereka sering tidak memiliki upah tetap, jaminan kehilangan pekerjaan, cuti sakit berbayar, atau akses mudah kepada kredit. Pedagang kecil dapat kehilangan modal kerja dalam hitungan hari; pekerja lepas kehilangan pesanan; pengemudi dan pekerja layanan menghadapi penurunan permintaan sekaligus risiko kesehatan. Instrumen fiskal yang hanya disalurkan melalui pemberi kerja formal atau sistem pengangguran kontributif mungkin tidak menjangkau mereka. Karena itu, saluran bantuan perlu mempertimbangkan bukti pendapatan yang beragam dan membuka cara pendaftaran yang tidak mensyaratkan dokumen yang sulit dimiliki kelompok informal.

Paket kebijakan dapat memadukan transfer sementara, subsidi iuran jaminan sosial, akses layanan kesehatan, bantuan pangan, dukungan likuiditas usaha mikro, dan program padat karya yang sesuai kebutuhan lokal. Bantuan usaha

perlu dirancang agar tidak hanya menyelamatkan pemilik modal, tetapi juga menjaga pekerja, pemasok, dan konsumen. Program pelatihan sebaiknya terkait permintaan nyata, bukan sekadar jumlah peserta. Evaluasi harus memeriksa apakah rumah tangga kembali memperoleh penghasilan dan apakah pekerja memiliki jalur menuju pekerjaan yang lebih produktif. Dengan demikian, dukungan fiskal dapat meredam guncangan jangka pendek sekaligus mengurangi kerentanan struktural yang membuat krisis berulang menjadi perangkap kemiskinan.

Keadilan antargenerasi dan etika penggunaan anggaran

Keputusan fiskal adalah pilihan etis karena membagi biaya dan manfaat antara kelompok sosial dan antarwaktu. Pemerintah yang menahan dukungan saat krisis dapat memindahkan biaya kepada keluarga melalui utang pribadi, penjualan aset produktif, putus sekolah, atau pengobatan yang tertunda. Sebaliknya, pembiayaan publik yang tidak terkendali dapat memindahkan beban bunga dan risiko ekonomi kepada generasi mendatang. Keadilan antargenerasi tidak berarti semua utang harus dihindari. Ia menuntut agar alasan berutang dijelaskan, manfaat yang dihasilkan dibandingkan dengan kewajiban masa depan, dan kelompok yang menikmati manfaat tidak selalu berbeda dari kelompok yang menanggung biaya.

Etika anggaran juga mencakup cara pemerintah menentukan siapa yang menerima bantuan dan siapa yang menanggung pajak. Data yang tidak akurat dapat membuat keluarga miskin terlewat; prosedur yang tidak aksesibel dapat menyingkirkan penyandang disabilitas atau warga di wilayah terpencil; kebijakan yang melindungi harga energi tanpa menilai distribusi manfaat dapat memberi porsi lebih besar kepada kelompok berdaya beli tinggi. Karena itu, analisis fiskal perlu menampilkan dampak distribusional secara eksplisit. Pemerintah harus menjaga kerahasiaan dan martabat penerima, menjelaskan dasar keputusan, menyediakan keberatan, serta memastikan pengadaan darurat tetap

berintegritas. Kecepatan respons tidak menghapus standar keadilan dan pertanggungjawaban.

Perlindungan sosial sebagai stabilisator ekonomi

Perlindungan sosial mencakup bantuan sosial nonkontribusi, jaminan sosial berbasis kontribusi, layanan sosial, dan kebijakan yang mencegah rumah tangga kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam krisis, bantuan tunai, bantuan pangan, subsidi layanan, dan jaminan kesehatan dapat mempertahankan konsumsi minimum. Rumah tangga berpendapatan rendah umumnya mengalokasikan bagian besar tambahan pendapatan untuk kebutuhan saat ini. Karena itu, bantuan yang cepat dan tepat sasaran dapat mengalir kembali ke warung, pasar, transportasi, serta usaha lokal. Fungsi ini tidak mengubah bantuan menjadi kebijakan stimulus semata; perlindungan martabat dan kemampuan hidup tetap menjadi tujuan utamanya.

Analisis lintas 42 negara oleh Cardoso et al. (2025) menemukan hubungan positif dan persisten antara belanja perlindungan sosial dengan PDB, dengan besaran pengganda yang bervariasi antarnegara dan cenderung lebih tinggi pada negara yang lebih timpang. Penulis juga mengingatkan bahwa hasil SVAR tersebut menunjukkan hubungan empiris, bukan bukti kausal yang berlaku seragam. Oleh karena itu, pembuat kebijakan tidak boleh mengambil satu angka pengganda dari negara lain sebagai prediksi pasti bagi Indonesia. Temuan tersebut mendukung argumen yang lebih hati-hati: belanja perlindungan sosial yang dirancang baik dapat meredam tekanan permintaan sekaligus mengurangi kemiskinan, tetapi dampaknya bergantung pada ketepatan sasaran, kapasitas distribusi, ketersediaan barang, dan desain pembiayaannya.

Ketepatan sasaran, cakupan, dan martabat penerima

Perdebatan mengenai bantuan sosial sering disederhanakan menjadi pilihan antara bantuan tertarget dan universal. Bantuan tertarget dapat memusatkan

sumber daya kepada keluarga yang paling membutuhkan, tetapi membutuhkan data yang akurat, prosedur yang dapat diakses, serta kapasitas memperbarui status. Kesalahan eksklusi terjadi ketika keluarga yang memenuhi syarat tidak menerima bantuan; kesalahan inklusi terjadi ketika bantuan diterima pihak yang tidak memenuhi kriteria. Dalam keadaan krisis, biaya kesalahan eksklusi dapat sangat besar, terutama bila bantuan menyangkut pangan, obat, atau tempat tinggal. Menetapkan ambang secara terlalu ketat dapat menghemat anggaran nominal sambil menimbulkan biaya sosial yang lebih besar.

Pendekatan berlapis dapat menggabungkan perlindungan dasar yang luas dengan tambahan tertarget bagi kelompok yang mengalami risiko tinggi. Contohnya, layanan kesehatan dasar dan akses pendidikan diberikan secara luas, sedangkan bantuan tunai tambahan diberikan berdasarkan tingkat kehilangan pendapatan atau dampak bencana. Prosedur penerima harus menjaga martabat: informasi jelas, tidak mempermalukan, tidak meminta pungutan, dan menyediakan pilihan akses bagi warga dengan keterbatasan digital. Evaluasi juga perlu mencatat siapa yang tidak terjangkau, bukan hanya jumlah transfer yang berhasil. Sistem pengaduan yang cepat dan transparan bukan beban administratif; ia merupakan mekanisme koreksi terhadap data yang tertinggal dan keputusan yang keliru.

Subsidi energi, pangan, dan perlindungan harga

Subsidi dapat menahan kenaikan harga dan melindungi daya beli, tetapi bentuk subsidi menentukan siapa yang memperoleh manfaat. Subsidi harga yang berlaku luas sering memberikan manfaat nominal lebih besar kepada rumah tangga yang mengonsumsi lebih banyak energi atau bahan bakar. Kebijakan tersebut dapat menekan inflasi dalam jangka pendek, tetapi membebani ruang fiskal, mendorong konsumsi yang kurang efisien, dan mengurangi dana untuk layanan publik. Subsidi yang tidak tepat sasaran juga dapat memperkuat ketergantungan anggaran pada harga komoditas atau nilai tukar. Karena itu,

perlu dihitung manfaat distribusional, biaya fiskal, dampak lingkungan, dan alternatif kompensasinya.

Peralihan menuju dukungan yang lebih tertarget perlu dilakukan bertahap dan disertai kesiapan data, kanal pembayaran, komunikasi, dan pengawasan harga. Pengurangan subsidi tanpa perlindungan pengganti dapat menekan rumah tangga miskin, usaha mikro, transportasi umum, serta pekerja yang bergantung pada mobilitas. Pemerintah dapat memadukan transfer sementara, dukungan transportasi, efisiensi energi, serta investasi pada akses energi yang lebih terjangkau. World Bank (2026) menekankan bahwa penguatan pendapatan, perbaikan mutu belanja, dan penargetan dukungan yang lebih baik dapat menjaga ruang fiskal bagi investasi prioritas dan perlindungan sosial. Prinsip utamanya ialah mengubah subsidi secara kredibel sambil melindungi kelompok yang benar-benar terkena dampak.

Penerimaan negara dan ruang fiskal

Kemampuan APBN menjadi penyangga krisis ditentukan bukan hanya oleh kemauan membelanjakan, tetapi juga oleh kapasitas memperoleh penerimaan yang stabil dan adil. Basis pajak yang sempit membuat pemerintah rentan terhadap penurunan komoditas, perubahan siklus ekonomi, dan volatilitas perdagangan. Penguatan administrasi pajak, pengurangan kebocoran, kepastian regulasi, perluasan kepatuhan, dan perbaikan kualitas layanan pajak dapat meningkatkan penerimaan tanpa selalu menaikkan tarif. Penerimaan yang lebih kuat juga memungkinkan negara membiayai layanan dasar dan investasi produktif tanpa terus memperbesar kebutuhan pembiayaan utang.

Ruang fiskal adalah kemampuan pemerintah menambah belanja atau mengurangi pajak tanpa mengganggu keberlanjutan utang dan akses pembiayaan. Ruang ini perlu dibangun ketika keadaan relatif baik melalui tabungan fiskal, pengendalian komitmen permanen, peninjauan insentif pajak, dan perbaikan efisiensi belanja. Penerimaan tidak boleh dimaksimalkan dengan

mengorbankan kepastian usaha dan keadilan; desain pajak perlu melihat kemampuan membayar, insentif investasi, formalitas tenaga kerja, dan distribusi beban. Pengelolaan pendapatan sumber daya alam juga perlu memperhitungkan volatilitas harga dan keterbatasan cadangan. Pendapatan yang sifatnya sementara sebaiknya tidak membiayai seluruh kewajiban rutin yang akan bertahan lama.

Komposisi belanja dan kualitas stimulus

Ketika permintaan melemah, belanja pemerintah dapat membantu menjaga kegiatan ekonomi, tetapi dampak per rupiah berbeda menurut jenis dan kesiapan belanja. Transfer yang cepat dapat menahan konsumsi; belanja pemeliharaan dapat mencegah kerusakan aset; investasi publik dapat memperluas kapasitas produksi jika proyeknya layak dan dikelola baik. Sebaliknya, belanja yang terlambat, pengadaan yang tidak kompetitif, proyek dengan manfaat rendah, atau bantuan yang tidak tersalurkan dapat menghasilkan defisit tanpa dorongan ekonomi yang sepadan. Dengan demikian, stimulus bukan sekadar besaran fiskal, melainkan paket kebijakan yang dirancang menurut jalur transmisi dan kebutuhan krisis.

Penilaian belanja perlu menggabungkan efektivitas, pemerataan, kecepatan, kesiapan, dan risiko implementasi. Dalam resesi, manfaat jangka pendek bisa lebih besar dari program yang dapat dimulai cepat, sedangkan pada masa normal pemerintah dapat mempersiapkan proyek yang meningkatkan produktivitas jangka panjang. Blanchard dan Perotti (2002) menunjukkan bahwa dampak guncangan pajak dan belanja publik terhadap aktivitas ekonomi dapat dianalisis secara empiris melalui respons dinamis, tetapi hasilnya bergantung pada identifikasi dan konteks institusional. Karena itu, pemerintah sebaiknya tidak menganggap seluruh kategori belanja memiliki multiplier yang sama. Evaluasi lokal berbasis data membantu menentukan kombinasi transfer, layanan, pemeliharaan, dan investasi yang paling sesuai.

Belanja kesehatan, pendidikan, dan modal manusia

Krisis sering membuat pemerintah tergoda mengutamakan pengeluaran yang paling terlihat, sementara investasi pada kesehatan, pendidikan, gizi, dan perlindungan anak dianggap dapat ditunda. Padahal, gangguan layanan dasar dapat menimbulkan kerugian kumulatif. Anak yang kehilangan pembelajaran atau gizi pada masa penting perkembangan mungkin membutuhkan dukungan lebih mahal di kemudian hari. Pasien dengan penyakit kronis yang menghentikan pengobatan berisiko mengalami komplikasi. Petugas kesehatan dan guru yang tidak mendapat dukungan dapat mengurangi mutu layanan. Perlindungan modal manusia harus menjadi bagian dari strategi ketahanan ekonomi, bukan hanya agenda sosial terpisah.

APBN dapat menjaga kontinuitas layanan dengan menetapkan belanja minimum yang benar-benar terkait mutu, mengutamakan daerah dan kelompok yang tertinggal, serta menghindari pemotongan seragam. Ketika pendapatan menurun, realokasi dapat dilakukan dari kegiatan berprioritas rendah menuju obat esensial, pemulihan pembelajaran, layanan gizi, atau dukungan psikososial. Namun, perlindungan pos anggaran tidak boleh berarti bebas evaluasi. Pemerintah tetap perlu memeriksa hasil layanan, aksesibilitas, distribusi tenaga, kualitas pengadaan, dan ketepatan penerima manfaat. Anggaran yang berlabel pendidikan atau kesehatan belum tentu menghasilkan outcome apabila tata kelola, insentif, dan kemampuan pelaksanaan tidak memadai.

Bencana, iklim, dan kewajiban fiskal tersembunyi

Risiko bencana dan perubahan iklim semakin penting bagi perencanaan fiskal karena kerusakan dapat memengaruhi penerimaan, aset publik, layanan dasar, dan kebutuhan rekonstruksi dalam waktu bersamaan. Banjir, kekeringan, kebakaran hutan, abrasi, dan cuaca ekstrem menimbulkan biaya yang tidak hanya tercatat pada pos tanggap darurat. Gangguan pada jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, irigasi, pelabuhan, dan jaringan listrik dapat mengurangi

produktivitas bertahun-tahun. Rumah tangga miskin sering tinggal di lokasi lebih rentan dan memiliki tabungan serta asuransi lebih sedikit. APBN perlu mengantisipasi risiko sebelum bencana, bukan hanya membayar setelah kerusakan terjadi.

Instrumen penyangga mencakup dana kontinjensi, penganggaran berbasis risiko, cadangan logistik, asuransi atau transfer risiko yang layak, standar pembangunan tahan bencana, dan mekanisme cepat untuk menyalurkan bantuan. Penilaian proyek publik perlu memasukkan risiko iklim sepanjang umur aset. Pendanaan rekonstruksi juga harus dibedakan dari belanja rutin agar biaya kejadian besar terlihat dan dapat dievaluasi. Pembiayaan risiko tidak selalu berarti membeli asuransi komersial; ia dapat berupa kombinasi cadangan, anggaran ulang, pinjaman darurat, bantuan internasional, dan instrumen pasar. Pemerintah daerah memerlukan kapasitas teknis agar rencana kontinjensi dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

Hubungan pemerintah pusat dan daerah

Krisis sering dirasakan pertama kali di tingkat desa, kelurahan, kabupaten, atau kota, sedangkan sumber pembiayaan dan kewenangan tersebar antara pemerintah pusat dan daerah. Transfer ke daerah dapat membantu menjaga layanan dasar, tetapi formula yang terlambat berubah atau data yang tidak seragam dapat menghambat respons. Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah mungkin menghadapi kebutuhan besar sekaligus pendapatan asli daerah yang turun. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas administrasi kuat dapat merespons lebih cepat, sehingga warga mengalami perlindungan yang tidak setara. Pemerataan fiskal dan kecepatan transfer menjadi unsur penting dari ketahanan nasional.

Pemerintah pusat dapat menyiapkan mekanisme transfer darurat yang memiliki pemicu, formula, persyaratan pelaporan, serta jalur audit yang sederhana tetapi kuat. Daerah perlu memiliki rencana kontinjensi, daftar aset dan penerima

manfaat yang dapat diperbarui, serta prosedur pengadaan darurat yang tidak menghapus persaingan dan integritas. Koordinasi data harus menghormati privasi dan membatasi pertukaran pada tujuan layanan. Setelah keadaan darurat, evaluasi bersama dapat mengidentifikasi kendala regulasi, kapasitas, serta ketimpangan sumber daya. Desentralisasi yang efektif bukan pemindahan tanggung jawab tanpa dukungan, melainkan pembagian kewenangan, pendanaan, informasi, dan akuntabilitas secara jelas.

Pembiayaan defisit dan pengelolaan utang

Defisit menyediakan pembiayaan ketika belanja dan kebutuhan penyangga melebihi penerimaan tahun berjalan. Utang dapat dibenarkan untuk mengatasi guncangan besar, menjaga layanan esensial, atau membiayai investasi produktif yang manfaatnya dinikmati lintas generasi. Namun, utang juga menciptakan kewajiban bunga, risiko pembiayaan ulang, paparan nilai tukar, dan potensi kerentanan terhadap perubahan suku bunga. Analisis keberlanjutan perlu memeriksa bukan hanya rasio utang terhadap PDB, tetapi juga jatuh tempo, mata uang, komposisi investor, kebutuhan pembiayaan bruto, pertumbuhan, suku bunga, serta potensi kewajiban di luar neraca.

Kualitas penggunaan dana pinjaman menentukan apakah defisit memperkuat atau melemahkan kapasitas masa depan. Pembiayaan untuk bantuan darurat dapat tepat ketika warga menghadapi ancaman langsung, tetapi perlu batas waktu dan kriteria penghentian. Pinjaman untuk infrastruktur harus disertai analisis biaya-manfaat, kesiapan proyek, pemeliharaan, dampak sosial-lingkungan, dan risiko permintaan. Pemerintah dapat mengembangkan strategi utang jangka menengah, memperluas basis investor domestik secara terukur, serta menjaga komunikasi yang konsisten. Transparansi mengenai jaminan, kewajiban BUMN, skema kerja sama pemerintah-swasta, dan tunggakan penting untuk mencegah risiko tersembunyi muncul ketika krisis sudah berlangsung.

Inflasi, suku bunga, dan koordinasi kebijakan

APBN bekerja di dalam perekonomian yang juga dipengaruhi kebijakan moneter, nilai tukar, ekspektasi, dan harga internasional. Belanja yang tidak terarah dalam situasi kapasitas produksi terbatas dapat meningkatkan tekanan harga, sementara kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dapat menaikkan biaya bunga dan pembiayaan pemerintah. Sebaliknya, dukungan fiskal yang terarah kepada rumah tangga rentan dapat menjaga konsumsi dasar tanpa memberi dorongan permintaan berlebihan di seluruh ekonomi. Desain perlu membedakan guncangan sisi permintaan dari guncangan pasokan, seperti gagal panen atau gangguan distribusi, karena respons kebijakan yang cocok dapat berbeda.

Koordinasi pemerintah dan bank sentral tidak berarti menghapus independensi mandat masing-masing. Koordinasi yang baik membagikan informasi, menyelaraskan perkiraan, menghindari pesan yang saling bertentangan, dan mengatur tempo respons. Bila inflasi bersumber dari kenaikan harga pangan, langkah logistik dan pasokan dapat melengkapi perlindungan pendapatan. Bila pelemahan ekonomi luas terjadi bersamaan dengan inflasi rendah, dukungan fiskal mungkin memiliki ruang yang lebih besar. Pemerintah perlu mengungkap asumsi makro dalam APBN dan memperbaruinya secara teratur. Skenario sensitivitas terhadap minyak, nilai tukar, suku bunga, dan pertumbuhan membantu publik memahami bagaimana perubahan asumsi mengubah kebutuhan anggaran.

Tiga skenario penerapan APBN sebagai penyangga

Skenario pertama adalah perlambatan global yang menekan ekspor dan investasi, lalu mengurangi jam kerja dan pendapatan pekerja. Respons dapat dimulai dari pemantauan indikator ketenagakerjaan, bantuan sementara bagi keluarga yang terdampak, dukungan pelatihan yang terhubung dengan kebutuhan pemberi kerja, dan percepatan pemeliharaan infrastruktur lokal.

Pemerintah perlu menghindari subsidi luas yang sulit dihentikan jika masalah hanya menyasar sektor tertentu. Dukungan kepada usaha kecil dapat diarahkan pada akses likuiditas, restrukturisasi kewajiban, dan pemeliharaan pekerja, dengan syarat transparan serta evaluasi agar tidak mempertahankan usaha yang tidak lagi layak.

Skenario kedua adalah lonjakan harga pangan akibat gangguan produksi dan distribusi. APBN dapat membiayai cadangan pangan, bantuan terarah bagi keluarga berpendapatan rendah, dukungan input bagi petani kecil, dan perbaikan rantai distribusi. Pada saat yang sama, kebijakan perlu mencegah belanja kompensasi yang hanya menaikkan permintaan tanpa memperbaiki ketersediaan. Skenario ketiga adalah bencana besar yang merusak permukiman serta fasilitas publik. Respons fiskal perlu menggabungkan logistik, hunian sementara, layanan kesehatan, transfer kepada daerah, dan rehabilitasi yang membangun kembali dengan standar lebih tangguh. Pada ketiga skenario, satu prinsip tetap: respons harus cepat, tetapi keputusan dan biaya harus dapat ditelusuri.

Pelajaran dari pandemi dan pemulihan

Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa krisis luas membutuhkan kebijakan yang bergerak melampaui prosedur anggaran rutin. Pemerintah harus menambah kapasitas kesehatan, melindungi penghasilan, menjaga keberlangsungan usaha, dan menyesuaikan prioritas belanja di tengah ketidakpastian tinggi. Pengalaman itu memperlihatkan pentingnya kecepatan, tetapi juga menyingkap masalah data penerima, keterlambatan pembaruan, tumpang tindih program, kesulitan menjangkau pekerja informal, dan variasi kapasitas antardaerah. Pelajaran utamanya bukan bahwa semua krisis dapat ditangani dengan instrumen pandemi, melainkan bahwa kesiapan sistem sebelum krisis menentukan kualitas respons ketika waktu sangat terbatas.

Pemulihan fiskal setelah krisis perlu bergerak bertahap. Penghentian dukungan terlalu cepat dapat mendorong kebangkrutan rumah tangga atau usaha yang masih layak, sedangkan perpanjangan tanpa evaluasi dapat menimbulkan ketergantungan dan biaya permanen. Pemerintah harus membedakan bantuan yang melindungi kebutuhan dasar, dukungan yang menjaga hubungan kerja, kompensasi untuk sektor terdampak, dan investasi yang meningkatkan produktivitas. Kriteria pengakhiran dapat menggunakan pemulihan pendapatan, lapangan kerja, akses layanan, dan kondisi kesehatan, bukan hanya tanggal kalender. Pengawasan legislatif dan publik tetap dibutuhkan agar kewenangan pengadaan dan realokasi darurat tidak mengurangi integritas pengelolaan keuangan.

Tata kelola, transparansi, dan partisipasi publik

Kepercayaan publik merupakan aset fiskal. Masyarakat lebih mungkin menerima pajak dan mendukung prioritas anggaran jika dapat melihat bahwa dana dikelola dengan alasan yang jelas, hasilnya berguna, dan penyimpangan ditindaklanjuti. Transparansi mencakup asumsi makro, dokumen anggaran, realisasi, perubahan kebijakan, penerima manfaat agregat, pengadaan, kewajiban kontinjensi, dan hasil evaluasi. Informasi perlu disajikan dalam bentuk yang dapat dipahami, bukan hanya tabel teknis. Transparansi juga memerlukan penjelasan mengenai keterbatasan data dan ketidakpastian proyeksi, sehingga revisi angka tidak ditafsirkan sebagai upaya menutupi keadaan.

Partisipasi masyarakat dapat memperbaiki pengenalan kebutuhan, terutama ketika dampak berbeda menurut wilayah dan kelompok. Konsultasi tidak boleh sekadar formalitas setelah keputusan diambil. Pemerintah dapat melibatkan organisasi lokal, kelompok disabilitas, asosiasi pekerja, petani, pelaku usaha mikro, perempuan, dan akademisi dalam pemetaan risiko serta evaluasi bantuan. Mekanisme pengaduan harus melindungi pelapor dari pembalasan, memberi nomor pelacakan, dan menyampaikan tindak lanjut. Audit internal, audit

eksternal, parlemen, media, dan masyarakat sipil menjalankan fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Sistem informasi publik yang konsisten dapat menurunkan ruang bagi korupsi dan mempercepat koreksi terhadap salah sasaran.

Indikator keberhasilan dan evaluasi

Kinerja penyangga fiskal perlu diukur lebih luas daripada tingkat penyerapan anggaran. Kecepatan dapat diukur dari waktu antara guncangan, penetapan penerima, dan diterimanya manfaat. Ketepatan sasaran dapat dinilai melalui tingkat kesalahan eksklusi dan inklusi. Dampak sosial dapat dilihat dari perubahan konsumsi dasar, status gizi, kehadiran sekolah, kesinambungan pengobatan, serta pemulihan mata pencaharian. Dampak ekonomi dapat dinilai melalui pekerjaan yang dipertahankan, aktivitas usaha, stabilitas permintaan lokal, dan kemudahan akses layanan. Aspek tata kelola mencakup keterbukaan, jumlah pengaduan yang terselesaikan, audit, insiden kebocoran, dan kepatuhan terhadap masa berlaku program.

Evaluasi harus membandingkan hasil dengan biaya dan alternatif kebijakan. Tidak setiap perubahan indikator setelah program berjalan disebabkan program tersebut; harga komoditas, cuaca, kebijakan moneter, dan perubahan pasar tenaga kerja dapat memengaruhi hasil. Desain evaluasi dapat memadukan data administrasi, survei rumah tangga, studi kualitatif, dan pembandingan wilayah. Indikator terpilah menurut gender, usia, disabilitas, pekerjaan, dan lokasi membantu mendeteksi siapa yang belum memperoleh manfaat. Hasil evaluasi perlu dipublikasikan dalam waktu yang berguna bagi penyusunan anggaran berikutnya. Dengan demikian, APBN menjadi proses belajar yang adaptif, bukan dokumen tahunan yang hanya dinilai setelah tahun anggaran berakhir.

Kerangka manajemen risiko fiskal

Kerangka manajemen risiko fiskal dapat dimulai dari empat langkah. Pertama, identifikasi sumber risiko, mulai dari makroekonomi, bencana, badan usaha publik, penjaminan, litigasi, hingga perubahan demografi. Kedua, ukur probabilitas dan besaran dampak, termasuk dampak berantai serta distribusinya antar kelompok. Ketiga, tentukan pemilik risiko dan instrumen mitigasi: cadangan, asuransi, pembatasan jaminan, protokol belanja darurat, atau investasi pencegahan. Keempat, pantau indikator dan laporkan perubahan secara berkala. Pembagian peran penting agar kementerian teknis tidak menganggap risiko fiskal semata-mata urusan Kementerian Keuangan, sementara risiko sektor tetap tidak memiliki pengelola yang bertanggung jawab.

Pemerintah dapat menyusun laporan risiko fiskal yang terhubung dengan APBN, memuat skenario dasar dan alternatif, serta memperbarui informasi ketika kondisi berubah. Skenario bukan ramalan tunggal, melainkan cara menguji ketahanan anggaran terhadap beberapa kemungkinan. Misalnya, jika pertumbuhan turun satu poin, rupiah melemah, harga minyak naik, atau bencana besar terjadi, pos mana yang paling tertekan dan langkah apa yang dapat diambil? Analisis sensitivitas tersebut membantu mencegah keputusan mendadak. Namun, model tidak menggantikan penilaian publik: asumsi, data, dan ketidakpastian harus disampaikan agar hasil analisis dapat diuji dan tidak menjadi klaim teknokratis yang menutup perdebatan.

Agenda reformasi untuk APBN yang lebih tangguh

Reformasi pertama ialah memperluas basis pendapatan secara adil dan dapat diprediksi, sambil memperbaiki administrasi dan kepatuhan. Reformasi kedua ialah memperkuat sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap guncangan melalui data yang terbarui, perlindungan dasar yang memadai, dan prosedur perluasan cakupan. Reformasi ketiga ialah meninjau subsidi dan insentif berdasarkan manfaat per kelompok, biaya fiskal, dampak lingkungan,

serta efektivitasnya. Reformasi keempat ialah mengintegrasikan risiko iklim, bencana, kesehatan, dan kewajiban kontinjensi dalam dokumen perencanaan dan pelaporan anggaran. Reformasi kelima ialah meningkatkan mutu pengadaan dan kapasitas pemerintah daerah agar dana darurat dapat mencapai warga tanpa mengurangi pengawasan.

Reformasi juga memerlukan institusi yang mampu belajar lintas periode. Evaluasi program krisis perlu menjadi masukan untuk desain aturan sebelum guncangan berikutnya. Data administrasi perlu interoperabel secara aman, tetapi pemanfaatannya harus tunduk pada batas tujuan, perlindungan privasi, dan kontrol akses. Penganggaran jangka menengah membantu pemerintah melihat biaya berulang dan efek kebijakan lintas tahun. Kerangka kinerja harus menghubungkan alokasi dengan hasil, bukan mendorong kementerian mengejar penyerapan semata. Terakhir, literasi fiskal publik perlu ditingkatkan agar warga dapat memahami trade-off antara pajak, belanja, defisit, utang, dan layanan. Keputusan fiskal yang sulit akan lebih legitim apabila alasan dan konsekuensinya dapat diperiksa.

Implikasi bagi manajemen pemerintahan dan pendidikan

Bagi manajemen pemerintahan, APBN sebagai penyangga krisis menuntut koordinasi lintas fungsi. Unit fiskal membutuhkan masukan dari kementerian sektoral, badan statistik, pemerintah daerah, bank sentral, penyedia layanan, dan organisasi masyarakat. Rantai keputusan harus jelas: siapa mengusulkan, siapa menguji dasar, siapa mengeksekusi, siapa memeriksa, dan kapan dukungan dihentikan. Pengelolaan krisis membutuhkan pemimpin yang dapat mengambil keputusan berbasis data sambil mengakui ketidakpastian. Keterampilan analisis skenario, manajemen risiko, pengadaan, komunikasi publik, serta evaluasi program perlu menjadi bagian dari kapasitas birokrasi, bukan hanya respons ad hoc setelah bencana terjadi.

Bagi pendidikan manajemen dan kebijakan publik, APBN merupakan kasus pembelajaran yang menghubungkan teori ekonomi, etika, strategi, dan pelaksanaan organisasi. Mahasiswa dapat menilai bagaimana pemerintah menyeimbangkan disiplin fiskal dengan perlindungan sosial; membandingkan bantuan tertarget dengan dukungan universal; atau menyusun skenario ketika penerimaan jatuh dan kebutuhan meningkat. Latihan berbasis kasus dapat meminta peserta menentukan indikator keberhasilan, strategi pembiayaan, risiko implementasi, dan kriteria penghentian. Pembelajaran tersebut membantu generasi muda memahami bahwa anggaran bukan hanya angka agregat, melainkan kontrak sosial yang memengaruhi kesempatan hidup masyarakat dan legitimasi negara.

Refleksi dan diskusi

Beberapa pertanyaan dapat menjadi dasar diskusi akademik dan kebijakan. Apakah batas defisit sebaiknya tetap berbasis angka sederhana, atau dilengkapi prosedur pengecualian yang lebih terstruktur? Bagaimana pemerintah menghindari bantuan yang terlambat tanpa mengurangi akuntabilitas? Data apa yang cukup untuk mengidentifikasi rumah tangga baru terdampak, dan siapa yang berhak mengaksesnya? Kapan subsidi luas dapat dibenarkan, dan kapan bantuan langsung lebih adil? Bagaimana membedakan belanja produktif dari belanja yang hanya cepat terserap? Pertanyaan ini mengingatkan bahwa desain fiskal selalu memuat pilihan distributif, bukan sekadar perhitungan teknis.

Diskusi dapat berlanjut pada hubungan antarwaktu. Jika pemerintah meminjam untuk menjaga konsumsi dan layanan dasar, risiko apa yang diwariskan kepada generasi berikutnya? Jika pemerintah menahan belanja demi menurunkan defisit, biaya sosial apa yang mungkin timbul? Jawaban yang bertanggung jawab memerlukan data mengenai kondisi awal, distribusi manfaat, biaya utang, hasil program, dan skenario alternatif. Mahasiswa dapat diminta membangun matriks risiko untuk satu guncangan—misalnya banjir besar atau kenaikan harga

pangan—kemudian mengusulkan paket respons dengan sumber pembiayaan, mekanisme sasaran, indikator, dan rencana penghentian. Dengan cara ini, refleksi tentang APBN menjadi latihan penalaran dan tanggung jawab publik.

Kesimpulan

APBN dapat menjadi penyangga krisis jika mampu menyerap sebagian guncangan ekonomi dan sosial tanpa kehilangan keberlanjutan fiskal. Kemampuan itu bergantung pada pendapatan yang kuat, komposisi belanja yang berkualitas, perlindungan sosial yang dapat diperluas, sistem data yang terus diperbarui, pengelolaan utang yang hati-hati, serta koordinasi pusat-daerah yang efektif. Disiplin fiskal memberi batas dan kredibilitas; fleksibilitas yang diatur memberi ruang merespons keadaan luar biasa. Keduanya perlu ditopang transparansi, pengawasan, evaluasi, dan rencana kembali ke lintasan fiskal yang wajar setelah krisis mereda.

Perlindungan kelompok rentan bukan tujuan tambahan yang dapat ditunda sampai pertumbuhan pulih. Ia membantu menjaga martabat, modal manusia, kemampuan bekerja, dan permintaan domestik; pada saat yang sama, belanja perlindungan yang dirancang baik dapat mendukung pemulihan yang lebih inklusif. Namun, manfaat itu bergantung pada sasaran, waktu, kecukupan, mutu pelaksanaan, dan sumber pembiayaan. Maka, pertanyaan pokok dalam setiap keputusan APBN bukan hanya berapa besar defisit atau belanja, tetapi siapa yang dilindungi, kerugian apa yang dicegah, hasil apa yang dicapai, berapa biayanya, serta bagaimana pemerintah memastikan program tidak berubah menjadi komitmen yang tidak terkendali.

Glossarium

APBN. Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui bersama DPR dan ditetapkan dengan undang-undang.

Automatic stabilizer. Unsur penerimaan atau belanja yang membantu meredam siklus ekonomi tanpa keputusan kebijakan baru untuk setiap kejadian.

Belanja berkualitas. Belanja yang dirancang dan dilaksanakan untuk menghasilkan manfaat publik yang terukur dengan biaya dan risiko yang dapat dipertanggungjawabkan.

Defisit anggaran. Keadaan ketika belanja negara melebihi pendapatan dalam periode anggaran tertentu dan selisihnya memerlukan pembiayaan.

Disiplin fiskal. Pengelolaan penerimaan, belanja, dan utang sesuai kemampuan ekonomi dan keberlanjutan kewajiban negara.

Fiscal space (ruang fiskal). Kemampuan menambah belanja atau mengurangi pajak tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal dan akses pembiayaan.

Fiscal multiplier (pengganda fiskal). Perubahan output ekonomi yang berhubungan dengan perubahan belanja pemerintah atau pajak, bergantung pada konteks dan metode estimasi.

Kelompok rentan. Individu atau rumah tangga yang lebih mudah mengalami kerugian serius akibat guncangan karena pendapatan, kesehatan, pekerjaan, lokasi, usia, disabilitas, atau akses layanan.

Kewajiban kontinjensi. Kewajiban potensial pemerintah yang dapat menjadi beban fiskal jika peristiwa tertentu terjadi.

Pagu anggaran. Batas tertinggi alokasi belanja yang ditetapkan untuk kementerian/lembaga atau program dalam periode anggaran.

Perlindungan sosial. Kebijakan dan program yang mencegah atau mengurangi risiko kemiskinan, kehilangan pendapatan, dan kerentanan sosial.

Ruang anggaran (budgetary space). Bagian dari pagu yang tersedia untuk prioritas baru setelah kewajiban dan belanja yang telah ditetapkan diperhitungkan.

Stabilisasi fiskal. Penggunaan pajak, belanja, dan pembiayaan untuk membantu meredam fluktuasi ekonomi dan menjaga layanan publik.

Transfer ke daerah. Penyaluran anggaran pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung urusan dan layanan yang menjadi kewenangannya.

Utang publik. Kewajiban pembiayaan pemerintah yang timbul dari pinjaman atau penerbitan surat berharga dan harus dikelola bersama risiko serta biaya pelunasannya.

Daftar Pustaka

Blanchard, O., & Perotti, R. (2002). An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output. The Quarterly Journal of Economics, 117(4), 1329–1368. https://doi.org/10.1162/003355302320935043

Cardoso, D., Carvalho, L., Lima, G. T., Nassif-Pires, L., Rugitsky, F., & Sanches, M. (2025). The multiplier effects of government expenditures on social protection: A multi-country study. Development and Change, 56(1), 172–224. https://doi.org/10.1111/dech.12869

Debrun, X., & Kapoor, R. (2010). Fiscal policy and macroeconomic stability: Automatic stabilizers work, always and everywhere (IMF Working Paper No.

10/111). International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781455200702.001

Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Indonesia. (2025). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-17-tahun-2025/overview

International Monetary Fund. (2024). Indonesia: 2024 Article IV consultation—Press release; staff report; and statement by the E xecutive Director for Indonesia (IMF Country Report No. 24/270). https://doi.org/10.5089/9798400284588.002.A001

International Monetary Fund. (2026). Indonesia: 2025 Article IV consultation—Press release; staff report; and statement by the Executive Director for Indonesia (IMF Country Report No. 26/010). https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2026/010/article-A001-en.xml

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025a). Nota keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/507d21b0-2abe-4d75-86aa-dc3efe505843

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025b). APBN 2026: Motor menuju pertumbuhan berkelanjutan. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/rapur-apbn26-motor-pertumbuhan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). APBN KiTa: Kinerja dan fakta, edisi Oktober 2026. https://www.kemenkeu.go.id/APBNKITAOktober2026

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). Social protection system review of Indonesia. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/788e9d71-en

World Bank. (2023). Indonesia poverty assessment: Pathways towards economic security. World Bank. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-poverty-assessment

World Bank. (2026, June 13). Indonesia's growth remains resilient, but productivity reforms are key to creating jobs and sustaining momentum. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2026/06/13/indonesia-s-growth-remains-resilient-but-productivity-reforms-are-key-to-creating